

## BAB II

### GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

#### 2.1 Tentang BKKBN dan Program Siap Nikah

Website resmi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga / BKKBN (2025) menuliskan awal mula gerakan keluarga berencana di Indonesia dimulai pada tahun 1957, tepatnya tanggal 23 Desember, ketika dibentuk Perkumpulan Keluarga Berencana di gedung Ikatan Dokter Indonesia. Perkumpulan ini kemudian berkembang menjadi Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) yang juga dikenal dengan nama *Indonesia Planned Parenthood Federation* (IPPF). PKBI memiliki tujuan untuk membantu terwujudnya keluarga yang sejahtera melalui tiga layanan utama, yaitu mengatur kehamilan (menjarangkan kelahiran), mengobati gangguan kesuburan, dan memberikan nasihat pernikahan.



**Gambar 2. 1 Logo PKBI**

Sumber : *Website* Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga /  
BKKBN

Pada tahun 1967, PKBI mendapatkan pengakuan resmi sebagai badan hukum dari Departemen Kehakiman. Di saat yang sama, Indonesia memasuki era Orde Baru. Pemerintah mulai memberi perhatian besar pada isu kependudukan, karena dianggap berkaitan langsung dengan pembangunan nasional. Berbagai kegiatan penyuluhan dan layanan keluarga berencana pun mulai diperluas ke berbagai wilayah. Momentum ini juga diperkuat dengan adanya simposium

kontrasepsi di Bandung dan Kongres Nasional PKBI di Jakarta pada tahun yang sama.

Langkah penting berikutnya terjadi pada masa Pelita I (1969–1974), ketika pemerintah membentuk Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) melalui Keputusan Presiden No. 8 Tahun 1970. Lembaga ini ditugaskan untuk menjalankan program KB secara nasional. Dua tahun kemudian, Keppres No. 33 Tahun 1972 memperkuat struktur organisasi dan menjadikan BKKBN sebagai lembaga pemerintah non-departemen yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden. Pada masa awal ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan klinis, karena program KB masih menghadapi banyak tantangan, dan jalur pelayanan kesehatan dianggap paling efektif untuk memperkenalkannya ke masyarakat.

Memasuki periode 2024–2029, BKKBN mengalami perubahan besar. Sesuai arahan Presiden, BKKBN ditingkatkan menjadi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga/BKKBN) melalui Peraturan Presiden No. 180 dan 181 Tahun 2024. Perubahan ini bertujuan agar pengelolaan isu kependudukan dan program pembangunan keluarga bisa berjalan lebih maksimal dan terarah.

Pada 21 Oktober 2024, Dr. H. Wihaji, S.Ag., M.Pd dilantik oleh Presiden Prabowo sebagai Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Kepala BKKBN. Sebelumnya, beliau pernah menjabat sebagai Bupati Batang periode 2017–2022. Mendampingi beliau, ditunjuk Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka sebagai Wakil Menteri, yang memiliki pengalaman kuat di dunia jurnalistik.

Transformasi BKKBN menjadi kementerian diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan program kependudukan dan keluarga berencana di Indonesia, sekaligus memperkuat komitmen negara dalam menciptakan masyarakat yang sehat, sejahtera, dan siap menyongsong Indonesia Emas di masa depan.

Sejak awal berdirinya, BKKBN tidak hanya menjalankan program pengaturan kelahiran, tetapi juga berkembang menjadi lembaga yang mengurus pembangunan keluarga secara menyeluruh. BKKBN memperluas fokusnya ke

berbagai aspek seperti kesiapan pernikahan, kesehatan reproduksi, edukasi remaja, hingga pencegahan stunting. Kelahiran BKKBN menjadi tonggak penting dalam sejarah pembangunan sosial di Indonesia karena menjadikan isu keluarga berencana sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional.



**Gambar 2. 2 Logo BKKBN**

Sumber : Website Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga / BKKBN

Maih dari sumber yang sama *website* resmi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga / BKKBN Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 180 dan 181 Tahun 2024, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga/BKKBN) memiliki tanggung jawab utama dalam mengelola urusan pemerintahan yang berkaitan dengan kependudukan dan pembangunan keluarga. Peran ini dijalankan untuk mendukung Presiden dalam menjalankan tugas pemerintahan negara.

Secara lebih spesifik, Kemendukbangga/BKKBN bertugas untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk dan menyelenggarakan program Keluarga Berencana (KB) sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Program-program yang dijalankan tidak hanya berfokus pada pengaturan kelahiran, tetapi juga mencakup berbagai upaya untuk membangun keluarga yang sehat, terencana, dan berkualitas.

Melalui tugas ini, Kemendukbangga/BKKBN berperan penting dalam menciptakan keseimbangan antara jumlah penduduk dan kualitas hidup masyarakat, serta mendorong terbentuknya keluarga yang mampu mendukung pembangunan nasional secara berkelanjutan.

Melalui *website* resmi Siap Nikah, penjelasan Program Siap Nikah BKKBN adalah program edukasi dan pendampingan yang dirancang untuk membekali calon pengantin dengan pengetahuan dan keterampilan dalam menjalani kehidupan pernikahan secara matang dan berkualitas. Program ini mencakup tiga aspek utama, yaitu kesiapan menikah, kesiapan finansial, serta kesiapan dalam mengasuh anak (*parenting*). Dengan pendekatan edukatif melalui kelas tatap muka, konsultasi, serta sertifikasi bagi calon pengantin, Program Siap Nikah diharapkan dapat membantu pasangan membangun keluarga yang harmonis, sehat, dan sejahtera.

Dalam program Siap Nikah, target utamanya adalah pasangan muda usia 20–30 tahun yang sedang mempersiapkan pernikahan, remaja akhir yang mulai memahami hubungan, serta pasangan baru menikah yang butuh panduan membangun rumah tangga. Berdasarkan karakter ini, gaya penyampaian harus disesuaikan agar terasa ramah, santai, dan mudah dicerna. Menurut Pratten, cerita yang efektif harus dirancang agar bisa membangun koneksi emosional, mendorong partisipasi audiens, dan dikemas sebagai pengalaman yang relevan. Oleh karena itu, dalam proses membuat konten Siap Nikah, pemahaman audiens sejak awal menjadi kunci agar pesan yang disampaikan bisa lebih kuat, menarik, dan berdampak.



**Gambar 2. 3 Logo Siap Nikah**

Sumber : *Website* Siap Nikah

Pada *website* resmi Siap Nikah juga dijelaskan logo Siap Nikah memiliki konsep utama yang menunjukkan bahwa dasar dalam membangun keluarga berkualitas adalah ikatan pernikahan yang sah, dibangun atas dasar cinta dan kasih sayang, serta diperkuat dengan komunikasi antar pasangan. Struktur utama logo

terdiri dari logogram, logotype, dan penggunaan warna.

- Logogram dalam logo Siap Nikah terdiri dari beberapa elemen ilustrasi yaitu rumah, cincin, hati (cinta), dan balon percakapan. Setiap elemen ini memiliki maknanya masing-masing dalam menggambarkan makna pernikahan dan hubungan antar pasangan.
- Logotype atau tulisan “Siap Nikah” dibuat dengan desain yang sederhana agar mudah dikenali dan diingat oleh masyarakat.

Warna-warna yang digunakan dalam logo Siap Nikah pun dipilih secara beragam, dengan tujuan untuk mewakili masing-masing ilustrasi yang terdapat dalam logogram. Sebagai bagian dari implementasinya, program ini diselenggarakan melalui berbagai metode, termasuk kelas edukasi tatap muka, webinar daring, konsultasi dengan tenaga ahli, serta sertifikasi bagi calon pengantin yang telah menyelesaikan pelatihan. Program ini juga bekerja sama dengan berbagai instansi seperti Kementerian Agama, Puskesmas, KUA, serta tenaga kesehatan, untuk memastikan bahwa calon pasangan suami istri mendapatkan bimbingan yang komprehensif sebelum menikah.

Dengan adanya Program Siap Nikah BKKBN, diharapkan pasangan muda dapat lebih siap dalam menjalani kehidupan pernikahan, sehingga angka perceraian dapat ditekan, kesejahteraan keluarga meningkat, dan generasi mendatang dapat tumbuh dalam lingkungan yang sehat dan berkualitas.

## 2.2 Visi Misi Program Siap Nikah

Visi dan misi yang tertera pada *website* Siap Nikah BKKBN sebagai salah satu program persiapan pernikahan yang dikembangkan oleh pemerintah memiliki visi dan misi sebagai berikut :

### **Visi :**

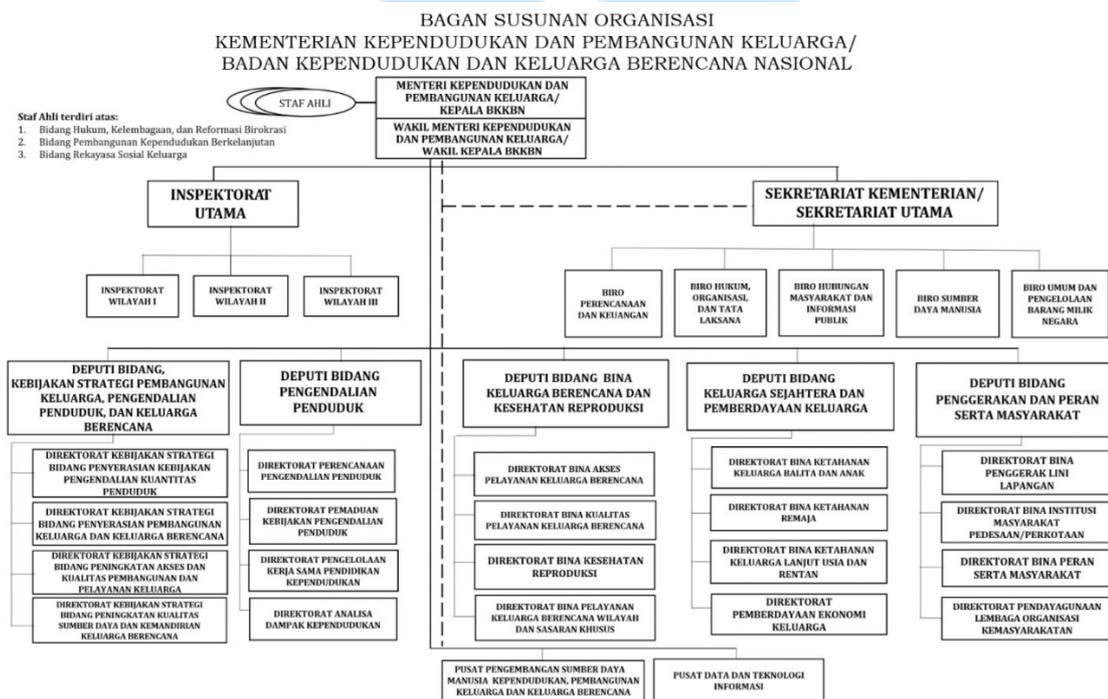
Menjadi Platform Informasi, Edukasi, dan Konsultasi Persiapan Menikah yang Terpercaya di Indonesia.

### **Misi :**

1. Sumber Informasi Edukasi Persiapan Pernikahan
2. Alat Pengukuran Tentang Kesiapan Menikah

3. Layanan Konseling Gratis dari Pemerintahan yang Dapat Menjaga Kerahasiaan
4. Terbangunnya Keluarga - Keluarga Berkualitas, Tentram, Mandiri dan Bahagia

### 2.3 Struktur Organisasi Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional



**Gambar 2. 4 Struktur Organisasi BKKBN**

*Sumber: Website Resmi BKKBN 2025*

Struktur organisasi didapat dari *website* Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (2025) adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. BKKBN dipimpin oleh Dr. H. Wihaji, S.Ag., M.Pd, selaku Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, yang didampingi oleh Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, S.Sos sebagai Wakil Menteri/Wakil Kepala BKKBN.

Secara operasional, BKKBN terbagi menjadi lima bidang deputy, yaitu:

1. Deputy Bidang Kebijakan Strategi Pembangunan Keluarga, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
2. Deputy Bidang Pengendalian Penduduk
3. Deputy Bidang Bina Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
4. Deputy Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga
5. Deputy Bidang Penggerakan dan Peran Serta Masyarakat

Selama magang, penulis ditempatkan di bawah naungan Deputy Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga, tepatnya di unit Direktorat Bina Ketahanan Remaja. Direktorat ini dipimpin oleh Dr. Edi Setiawan dan berfokus pada peningkatan kualitas remaja melalui program edukasi, salah satunya adalah program Siap Nikah sebagai *Content Creator*.



**Gambar 2.5 Struktur Divisi Social Media Siap Nikah**

Sumber: Olahan penulis berdasarkan diskusi dengan supervisi (2025)

Penempatan divisi magang penulis adalah *Content Creator*, dibawah kepemimpinan Koordinator Program Siap Nikah yaitu Anggi Osyka, penulis bertugas untuk memproduksi dan mengelola konten agar menaikkan *brand awareness* masyarakat terhadap media sosial dari program Siap Nikah. Divisi ini juga bertugas menjadi talent dalam produksi konten yang akan di unggah ke media sosial Siap Nikah. Sebagai *Content Creator Intern*, penulis tidak bekerja sendiri, melainkan berkolaborasi menghasilkan produksi konten bersama dua divisi lainnya yaitu *Creative Writer Intern* dan *Campaign Planner Intern*. *Creative Writer* membantu dalam penyusunan naskah atau caption yang sesuai dengan tujuan pesan kampanye edukatif. Sementara, *Campaign Planner* bertugas merancang strategi distribusi dan penjadwalan konten, serta memastikan konten yang dibuat selaras dengan momen kampanye yang sedang berjalan. Koordinasi penyampaian pesan, masukan hingga *review* konten dilakukan melalui penulis (*content creator*), lalu disampaikan kembali ke supervisi melalui penulis.

